

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gempol

Oleh:

Akhmad Khabibi,

Isnaini Rodiyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024



Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah utama yang masih ditangani Pemerintah, pemberantasan kemiskinan telah digalakkan dengan berbagai macam program yang dilaksanakan Pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Program-program bantuan tersebut diciptakan dengan harapan untuk bisa membantu kehidupan warga masyarakat yang masih mempunyai kondisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bantuan sosial yang diperuntukkan bagi keluarga miskin berkomponen serta bertujuan untuk mensejahterakan warga masyarakat miskin sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia oleh Pemerintah.

Gap Permasalahan



Gagal salur pencairan
dana PKH



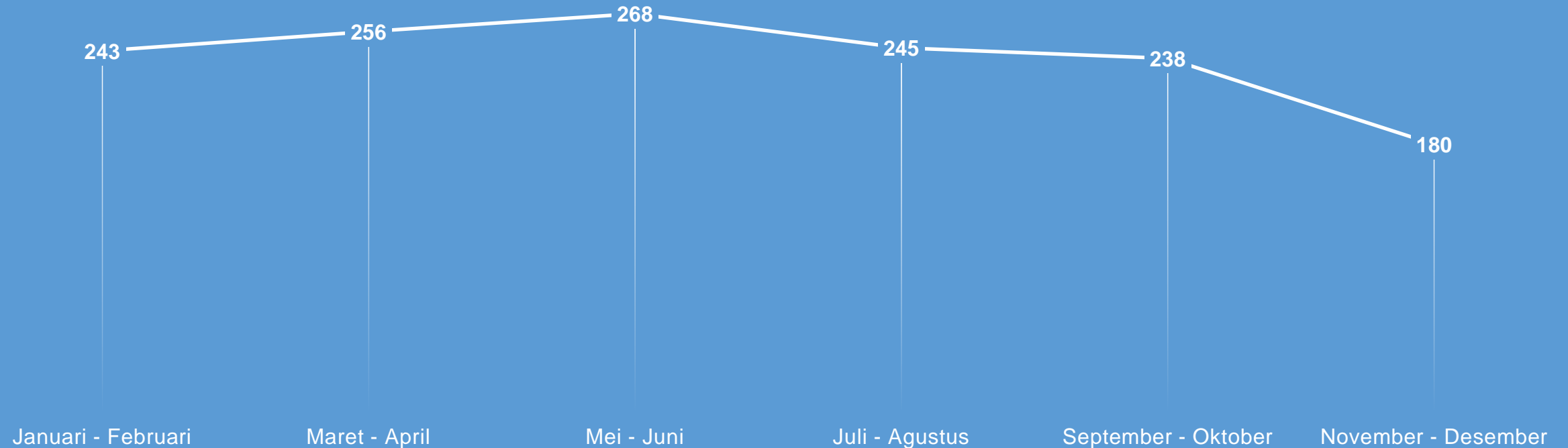
Sosialisasi mekanisme
PKH di tingkat satuan
lingkungan setempat

Data Empiris

DATA PESERTA PKH TAHUN 2023

—BULAN

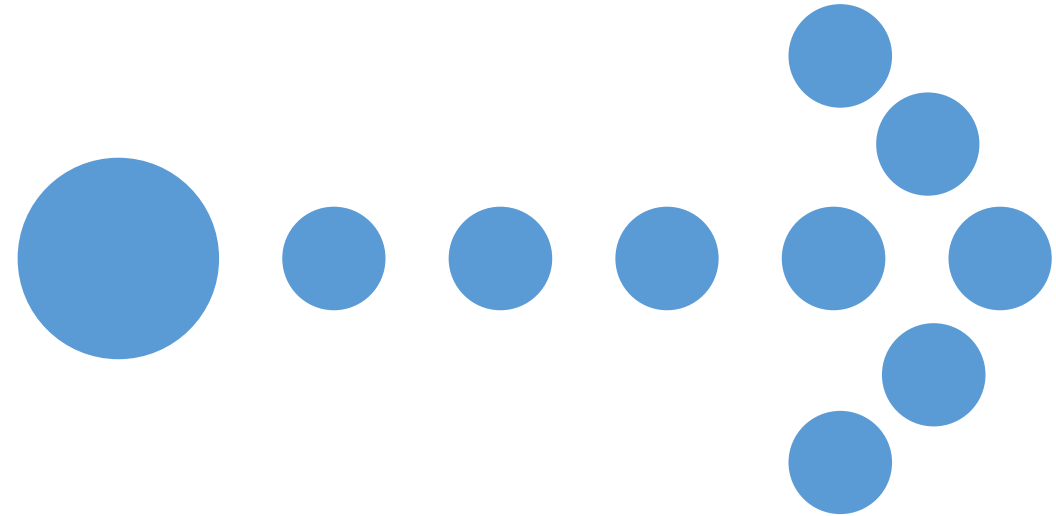
KELUARGA



Statistik Perkembangan Jumlah Peserta PKH

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi PKH di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan?



Penelitian Terdahulu

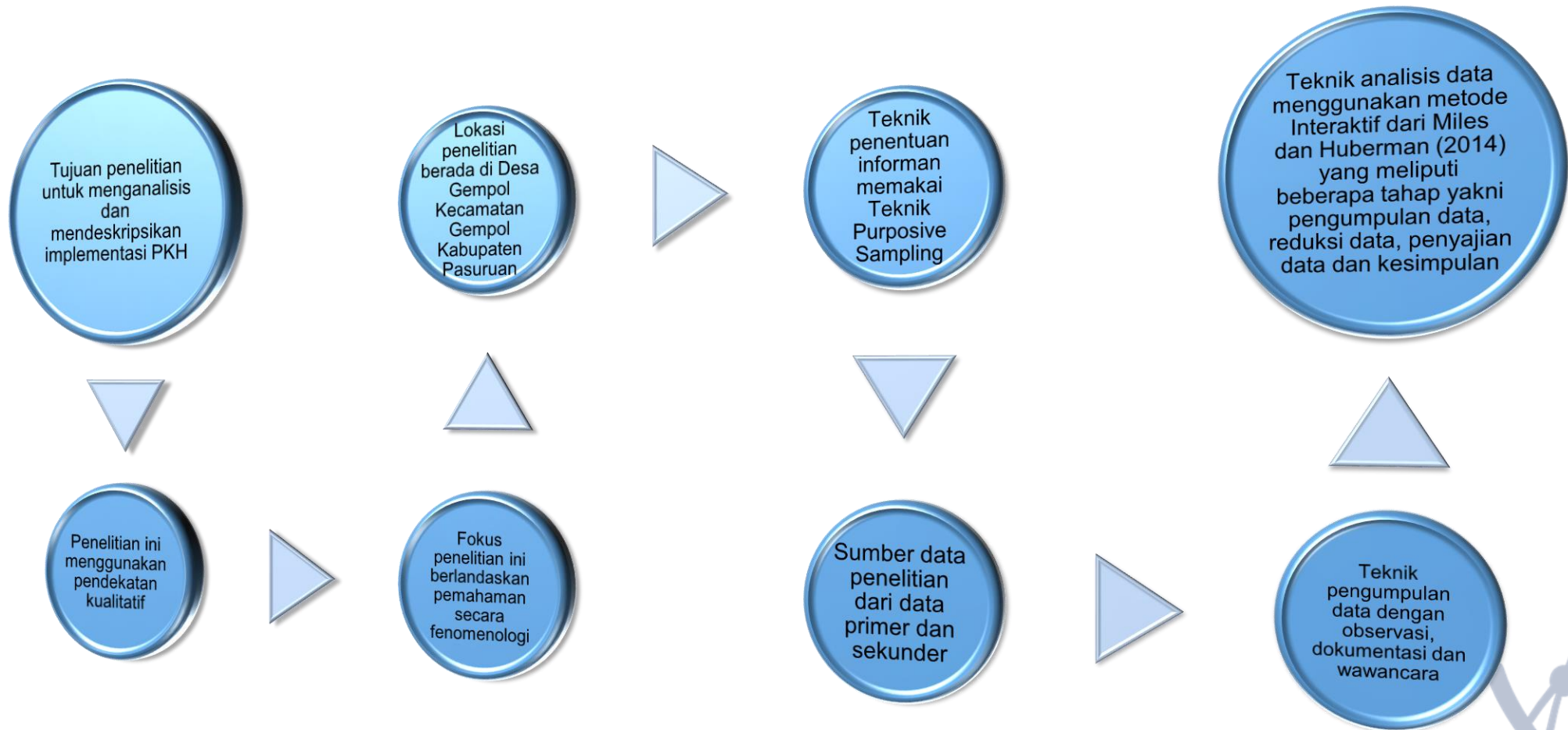
Sofianto, A. (2020).
“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah”

Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021).
“Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak”

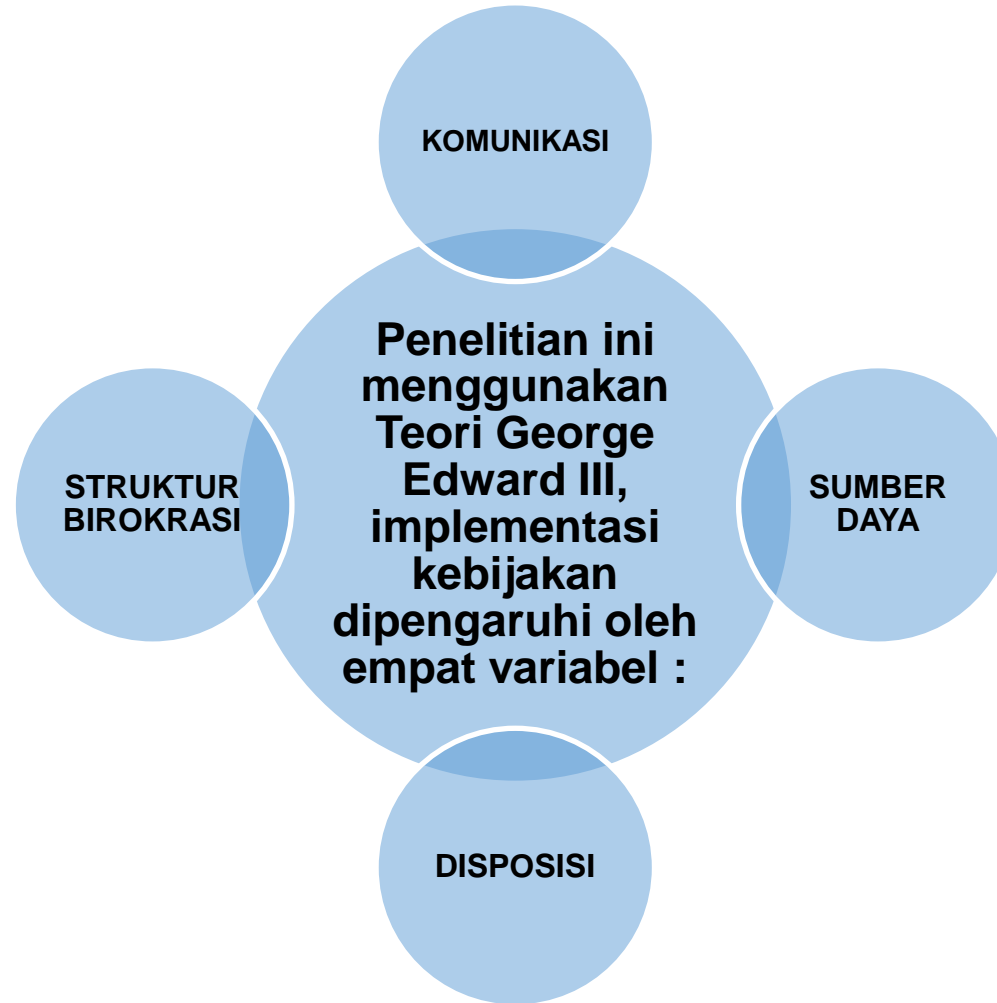
Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022).
“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango”

Penelitian terdahulu menggambarkan bahwasanya pelaksanaan PKH masih menyisakan masalah yang harus dikaji lebih dalam agar program bantuan sosial ini benar-benar bisa terlaksana demi membangun kualitas hidup warga masyarakat yang sejahtera sebagai wujud tujuan pembangunan negara.

Metode



Hasil dan Pembahasan



Hasil dan Pembahasan



KOMUNIKASI

Gagal salur disebabkan oleh penolakan sistem perbankan yang diterapkan oleh KEMENSOS dan masalah ini berada di luar kendali Pendamping PKH Desa.

Banyak warga miskin di Desa Gempol yang belum memahami persyaratan untuk masuk dalam DTKS.

Hasil dan Pembahasan



Kompleksitas pengelolaan anggaran PKH oleh penerima manfaat



Peran krusial pengetahuan dan keterampilan petugas lapangan serta koordinator program dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program



Pentingnya akses yang tepat dan penggunaan informasi yang akurat bagi semua pihak termasuk penerima manfaat untuk mendukung keputusan dan partisipasi yang lebih efektif dalam program ini

Hasil dan Pembahasan



DISPOSISI

Kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan PKH menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, dengan upaya intensif dari Perangkat Desa, Pendamping PKH, dan Operator SIKS-NG untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan ketaatan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam memastikan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan, dalam merencanakan dan mengevaluasi program tersebut. Sementara itu, dukungan komprehensif dari pihak Pemerintah Desa Gempol sangat penting dalam memotivasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan PKH secara maksimal. Selain itu, tingkat komitmen masyarakat, seperti yang tercermin dalam interaksi aktif dan komunikasi terbuka antara Pendamping PKH dan komunitas.

Hasil dan Pembahasan



STRUKTUR BIROKRASI

Setiap unit memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas untuk menjalankan fungsi-fungsi kunci yang mendukung program tersebut. Koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, penggunaan teknologi seperti aplikasi SIKS-NG yang handal, serta adaptabilitas terhadap dinamika lokal dan regulasi yang berlaku.

Kesimpulan

- Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gempol, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Salah satunya adalah kompleksitas sistem administratif yang melibatkan interaksi antara KEMENSOS, Bank, dan pihak terkait lainnya, yang sering kali mengalami hambatan seperti penolakan data oleh sistem Bank. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara semua stakeholder untuk memastikan kelancaran dalam penyaluran dana PKH, serta tantangan dalam pemahaman dan edukasi peserta PKH terkait persyaratan masuk ke dalam DTKS yang juga menjadi perhatian utama. Edukasi yang terus-menerus diperlukan guna mengubah persepsi peserta dan memastikan manajemen status kepesertaan yang akurat. Selain itu, aspek finansial dan peran sumber daya manusia merupakan fokus penting untuk meningkatkan efisiensi program, dengan kompleksitas pengelolaan anggaran oleh penerima manfaat menuntut perluasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana. Peran petugas lapangan dan koordinator program juga krusial dalam mempengaruhi efektivitas implementasi PKH, sehingga evaluasi kinerja dan pelatihan berkala kepada mereka diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola program ini secara efisien. Dengan dukungan komprehensif dari Pemerintah Desa Gempol dan komitmen aktif masyarakat, diharapkan langkah-langkah perbaikan ini akan menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sasaran PKH di masa depan.

Referensi

1. S. L. Schlindwein *et al.*, “No Titleبييب,” *PERMENSOS NO.1 Tahun 2018*, vol. ث قفتق, no. ثق ثقتق, p. ثقتق, 2018, [Online]. Available: https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379
2. H. 1Faculty Saifullah1, Madaling2, Muhammad Bibin3, “Implementation of the Integrated One Way Data in Improving the Quality of Public Services in Rappang Implementation of the Integrated One Way Data in Improving the Quality of Public Services in Rappang”, doi: 10.1088/1755-1315/717/1/012049.
3. N. Mamonto1 and I. S. G. Undap3, “Issn : 2337 - 5736,” no. 1, pp. 1–11, 2018.
4. K. Rejo, K. Negeri, K. Kabupaten, and R. Isnani, “No Title,” 2018.
5. A. Sofianto, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah,” no. December 2020, 2021, doi: 10.33007/ska.v10i1.2091.
6. Arie Rusmay, “Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk 4,” *Донну*, vol. 5, no. December, pp. 118–138, 2020.
7. A. F. Ardiyanto and I. Prabawati, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan),” *Publika*, pp. 13–24, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n1.p13-24.
8. H. Umi kalsum, Nurul Umi Ati, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kebijakan UU No . 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang),” *J. Respon Publik*, vol. 13, no. 6, pp. 70–76, 2019.
9. H erlina, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai,” 2019.
10. P. K. H. Dalam, M. Kemiskinan, and I. Palopo, “(PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI,” 2023.

Referensi

11. A. S. N. dan K. E. W. Uswatun Casanah, Tharisma Novitasari, “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU,” *J. Indones. Sos. Teknoilogi p-ISSN 2723 - 6609*, vol. 2, no. 5, pp. 886–896, 2021.
12. Y. Elisah, “EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENUNJANG FASILITAS PENDIDIKAN SISWA KURANG MAMPU DI KOTA CILEGON,” 2022.
13. E. C. HUTAGAOL, “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG,” 2023.
14. C. R. Mirsandi, “Implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat (studi dikecamatan setia kabupaten aceh barat daya),” *J. Chem. Inf. Model.*, pp. 1–103, 2019, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>
15. A. A. Wijanarko and E. Rustianingsih, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto,” vol. 5, no. 1, pp. 17–40, 2024.
16. R. Kusdinar and D. I. Pergiwa, “Implementation Of The Harapan Family Program Csitu Sub-,” vol. 10, no. 2, pp. 313–320, 2021, doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4368.
17. I. Gok, A. Hariandja, and D. Muhafidin, “PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut,” vol. 10, no. 1, pp. 29–41, 2024, doi: 10.25299/jiap.2024.16203.
18. S. RAHMAYUNI, “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SABANG,” 2022.
19. W. S. Aprilia, “IMPLEMENTASI KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah),” *Skripsi*, 2024.
20. S. Ayu and M. Regitha, “EVALUASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KABUPATEN GIANYAR,” vol. 2, pp. 39–52, 2022.

